

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, 2009). Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku (Ayu, 2015).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu pelaksana tugas pengendalian intern pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di BPKP, tentunya terdapat banyak sekali auditor yang mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan dan kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bahan bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah pengevaluasian bahan bukti (Ayu, 2015). Hal tersebut terbukti dari laporan hasil pengawasan atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah yang diberikan oleh tim auditor BPKP perwakilan Sumatera Selatan, karena laporan tersebut memberikan pandangan dan informasi yang mendetil antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan SumSel**

Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan Pengawasan
Pelaporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebanyak 13 pemda telah menetapkan APBD Tahun 2015 secara tepat waktu dan 5 pemda beum tepat waktu.</li><li>2. BPKP Perwakilan Sumatera Selatan telah</li></ol>

	<p>melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <p>3. Hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberi nilai B untuk 2 pemerintah daerah, CC untuk 8 pemerintah daerah, C untuk 5 pemerintah daerah, dan D untuk 1 pemerintah daerah.</p>
Kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset	<p>1. Verifikasi/validasi piutang negara bukan pajak; di PT Bank BRI (persero) terdapat saldo rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang verstek sebesar Rp.171.571.860,- atas nama Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.</p> <p>2. Terdapat kewajiban pengembalian ke kas negara atas klaim Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp.536.476.269,50,-</p> <p>3. Hasil audit penyesuaian harga pada satker Kementerian Pekerjaan Umum menghasilkan penghematan sebesar Rp.13.732.607.915,-</p>
Perwujudan iklim ke pemerintahan yang baik dan bersih	<p>1. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP sejak tahun 2001 yang belum ditindaklanjuti senilai Rp.31.342.462.180,66,- meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2014.</p> <p>2. Pendampingan <i>Fraud Control Plan</i> pada PT. Pusri dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>3. Hasil koordinasi supervisi pencegahan korupsi bersama Komisi Memberantas Korupsi.</p> <p>4. Hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara mencapai Rp.25.631.235.679,-</p> <p>5. Hasil evaluasi tata kelola aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap 12 inspektorat kabupaten/kota sudah mencapai “level dua dengan catatan” dan 9 inspektorat kabupaten/ kota pada level 1.</p>

Pengelolaan program lintassektoral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil audit operasional Program Rehabilitasi Sosial TA 2013 dan 2014 menemukan permasalahan tata kelola program yang belum sepenuhnya memadai dan terdapat kelebihan pembayaran dan harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.205.699.520,29.</li> <li>2. Hasil audit intern program pembangunan infrastruktur pedewasaan (PPIP) = semester II tahun 2014 menunjukkan tingkat kesiapan penyelenggara PPIP pada tingkat Provinsi/ Kabupaten dengan kategori “cukup siap”, sedangkan pada tingkat desa “cukup efektif”.</li> <li>3. Hasil audit operasional raskin tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 3 kabupaten dengan kategori “cukup berhasil”, 1 kabupaten “belum sepenuhnya berhasil”, dan 1 kabupaten “kurang berhasil”.</li> <li>4. Terhadap hambatan kelancaran pembangunan jalur ganda kereta api ruas Niru-Tanjung Enim Baru telah dilakukan proses mediasi lanjutan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.</li> </ol>
------------------------------------	---

Sumber: *BPKP Perwakilan Sumatera Selatan 2015*

Dengan laporan hasil audit yang berbobot, maka dapat dilihat bahwa auditor harus memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan audit. Tentunya BPKP Perwakilan Sumatera Selatan telah memiliki auditor yang baik dan kritis sehingga kualitas audit yang dihasilkan tergolong baik.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Ashari (2011) kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Terlebih lagi auditor BPKP

perwakilan Sumatera Selatan yang dituntut untuk mempunyai kompetensi di bidang auditing baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap auditor sehingga diharapkan dapat tercapainya *good corporate governance*. Auditor yang tidak kompeten tidak akan bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah-masalah yang mengandung resiko, padahal tugas auditor di era ini lebih difokuskan kepada pengawasan dan pengendalian terhadap area-area yang mengandung resiko bukan hanya audit atas kepatuhan saja.

Selain berkompoten dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor juga harus independen dalam melakukan audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya, independensi dapat digolongkan menjadi empat subvariabel yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, rekan auditor, dan jasa non audit (Agusti, 2013).

Auditor dalam pekerjaannya pun harus memiliki integritas karena dengan adanya integritas maka auditor memiliki sifat jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab. Sulaiman (2010:131) mengatakan bahwa integritas merupakan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup.

Selain kompetensi, independensi dan integritas yang dimiliki auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya, seorang auditor juga harus berpegang teguh pada etika auditor, karena etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Purnamasari (2013) menyatakan bahwa etika pada umumnya merupakan suatu aturan yang mencakup nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, termasuk dalam lingkup sebuah profesi, tidak terkecuali profesi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Ditinjau dari sudut pandang profesi akuntan publik, seorang auditor harus memiliki kesadaran etis yang tinggi pada saat melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa laporan keuangan. Dengan

demikian pendapat yang juga akan sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai kondisi keuangan perusahaan yang diauditnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kualitas audit ini. Imansari dkk (2016) menyatakan bahwa secara parsial kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian berdasarkan penelitian dari Singgih (2010) Independensi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sukriah (2009) melakukan penelitian tentang integritas auditor terhadap kualitas audit yang menghasilkan kesimpulan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian dari Nur'aini (2014) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas audit dengan menambahkan variabel penelitian dan melakukan penelitian di tempat yang berbeda. Sehingga penulis mengangkat judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
2. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
3. Apakah integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
4. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
5. Apakah kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen (kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor) dan satu variabel dependen (kualitas audit).
2. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan.
3. Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar sebanyak 111 kuesioner kepada seluruh auditor di BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit.

#### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penulisan ini antara lain :

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat, sebagai informasi untuk mengetahui serta mengukur apakah kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
3. Penulis, menambah wawasan terhadap pengaruh kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit.

b. Manfaat Praktis

1. Auditor, sebagai informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas audit dengan memperbaiki kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor sehingga dengan meningkatkan hal tersebut kualitas audit dapat menjadi lebih berkualitas.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai sarana informasi dan referensi dalam mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit.